

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 307 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TERMINAL ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI KOTA SANGGAU

Oleh  
**RAMASYAFARDI**  
NIM. E01109068

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Tahun 2017

e-mail: [ramasyafardi@gmail.com](mailto:ramasyafardi@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan menganalisis efektifitas kebijakan penetapan terminal angkutan orang dan barang di Kota Sanggau. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu adanya kesulitan intansi Perhubungan dalam mengalokasikan supir-supirangkot yang ada di terminal A.Yani ke terminal Rawa Bangun. Kurang komitmen serta konsistensi implementor dalam penetapan terminal angkutan orang dan barang, kurangnya dukungan masyarakat terhadap penetapan terminal kota. Peneliti menggunakan Teori dari D.Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2010: 94) dengan 3 variable yaitu: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, melalui metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi keputusan Bupati tentang penetapan terminal angkutan orang dan barang telah memberikan dampak yang cukup baik dalam rangka menertibkan kegiatan angkutan penumpang maupun barang. Hanya saja dalam konteks penetapan fungsi suatu terminal sebagai program dalam mengembangkan kegiatan - kegiatan transportasi yang didasarkan atas terjaminnya pelayanan transportasi belum tercermin dalam kegiatan penetapan terminal angkutan orang dan barang. Kurang efektifnya Implementasi penetapan angkutan orang dan barang di Kota Sanggau dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor tingkat kesulitan implementor, faktor kurangnya seriusan dan komitmen, faktor kurangnya dukungan dari publik, serta faktor adanya sikap atau tindakan dari kelompok sasaran kebijakan.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Transportasi, Angkutan Kota

## Abstract

The purpose of this research that is want to know and analyzes the effectiveness of the determination of transport policy terminal people and good in tehe Sanggau city.As for the problem mof research is to have faced some di ffficulties agencies transportation in allocating driver driver mini vans that is in terminal A.Yani to the terminal Rawa Bangun. Less commitment and consistency implementor in the determination of transport terminal people and good, less his the support of in selecting the city terminal. Researchers used the theory of D.Mazmanian and Sabatier in Ag.Suharsono (2010,94) with 3 variable namely characteristic problem, characteristic of policy, and characteristic of environment. Methods used is the method the qualitative study,through research methodology qualitative, the research result show that the implementation of Bupati decreeon the provision of terminal people and goods transport have an impact that would be good enough in order to curb activities passengers and good. Only in the context of the determination of function a terminal as a program in developing activities transportation based on guaranteeing transportation sevices not reflected in the determination of terminal people and goods transport. The ineffective the implementation of the determination of transportation people and goods in city Sanggau in stir by several factors that is factors the level of difficulty implementor, factors less serious and commitment, factors lack of support from the public and the attitude or action of the target group policy.

*Keywords: implentattion, transport policy, city transport*

## A. PENDAHULUAN

Dalam Pemerintah Daerah berbagai persoalan biasanya terjadi dalam melaksanakan tugasnya. Persoalan - persoalan sosial seringkali menghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah di Indonesia. Persoalan-persoalan tersebut muncul, bisa disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan, sampai dengan faktor - faktor non teknis yang mengganggu proses implementasi kebijakan. Dalam implemementasi kebijakan terminal, pemerintah mempunyai landasan hukum sebagai berikut; dalam keputusan Menteri Perhubungan No 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan Umum.

dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
2. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

3. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota.

4. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;.

Permasalahan implementasi kebijakan yang berada di pemerintah kota Sanggau, khususnya Dinas Perhubungan, Informasi dan Informatika yang terkait dengan implementasi terminal angkutan kota dan barang di kota Sanggau. Dinas Perhubungan mengalami kendala dalam merelokasikan supir - supir yang ada di terminal A. Yani ke terminal Rawa Bangun. Dalam segi letak terminal, kemampuan implementor dan komitmen pengurus terminal sangat rendah sehingga kegiatan tidak optimal, padahal letak terminal dan potensi terminal rawa bangun sangat strategis. Penetapan terminal belum efektif sehingga yang dilakukan oleh implementor belum jelas, dan sanksi yang harus di tindak untuk supir angkot belum ditindak dengan tegas. Hal ini adalah fenomena yang terjadi di lapangan hingga sampai sekarang. Kesulitan dalam

mengoptimalkan terminal rawa bangun sebagai terminal angkutan kota adalah kesimpulan bahwa implementor mengalami kesulitan dalam menetapkan fungsi terminal angkot, dan sulitnya dalam merelokasikan supir - supir untuk beroperasi ke terminal rawa bangun. Melihat dalam keputusan Bupati nomor 307 tahun 2009 menetapkan bahwa terminal rawa bangun difungsikan sebagai terminal angkutan penumpang. Pada kenyataannya terminal rawa bangun tampak sepi, hal ini adalah bahwa tingkat keseriusan dan komitmen implementor sangat kurang dalam menetapkan terminal angkutan penumpang dan barang.

Fokus penelitian ini yaitu mengenai Efektifitas Kebijakan Penetapan Terminal Angkutan orang dan barang di rawa bangun Kota Sanggau.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas kebijakan penetapan terminal angkutan orang dan barang di Kota Sanggau

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pemikiran mahasiswa dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya aspek kebijakan publik. Sedangkan manfaat praktis penelitian agar dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya pada Dinas BAPPEDA dan Dinas

Perhubungan kota Sanggau, dalam menetapkan terminal angkutan orang dan barang. Adapun aspek praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Sanggau dalam menyempurnakan proses kebijakan keputusan Bupati No.307 tahun 2009 tentang penetapan terminal angkutan orang dan barang di Kota Sanggau.
2. Menjadi bahan masukan bagi Dinas BAPPEDA dan Dinas Perhubungan Kota Sanggau dalam mengatasi hambatan penetapan terminal angkutan orang dan barang di Kota Sanggau.
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Sanggau dan Dinas Perhubungan agar memberikan solusi yang jelas dan tegas kepada aparaturpelaksana maupun supir-supir yang terlibat dalam penetapan terminal angkutan orang dan barang di Kota Sanggau.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis

besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas public, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan Publik oleh R. dye sebagaimana dikutip Thoha (2008:107) didefinisikan “Sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*)”. Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Adapun menurut Carl Friedrich (Pandji 2008:35) kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah Daerah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Ahli Ilmu Politik lainnya, David Easton (sebagaimana dikutip dalam Thoha, 2008:107) “Adapun alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan

tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat. Dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah Daerah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai tersebut”.

Sedangkan James Anderson (dalam Agustino, 2006:7) memberikan pengertian kebijakan publik, “sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan kepada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Kebijakan Publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, penulis akan berusaha

meninjau implementasi kebijakan Penetapan terminal angkutan orang dan barang yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 307 tahun 2009.

Menurut Mustopadidjaja(dalam Tachjan, 2006:20-21),pada garis besarnya suatu kebijakan terdiri dari tiga hal pokok, yaitu :perumusankebijakan,implementasi kebijakan,danpengawasan dan penilaian (hasil)pelaksanaan kebijakan.

D.Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2010: 94),implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga variable, yaitu :

#### A. Karakteristik masalah :

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

#### B. Karakteristik kebijakan :

1. Kejelasan isi kebijakan.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
3. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut dalam hal ini mengenai sumber daya keuangan dan staf

4. Hubungan atau dukungan antar organisasi pelaksana.
5. kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
7. seberapa luas akses kelompok-kelompok luar yaitu masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

#### C. Variabel Lingkungan

1. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi.
2. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan.
3. Sikap dari kelompok pemilih.
4. tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Menurut Winarno (2002:102) “implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya”.

Lester dan Steward Jr.(dalam Agustino,2008:139), mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Marrile Grindle (dalam Agustino, 2008:139) juga mengatakan, “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Menurut Dimock (dalam Tachjan, 2006: 71) mengemukakan bahwa ada beberapa tindakan yang diambil dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Penentuan tujuan dan sasaran organisasional;
2. Analisis serta perumusan kebijakan dan strategi;
3. Pengambilan keputusan;
4. Perencanaan;
5. Penyusunan program;
6. Pengorganisasian;
7. Penggerakan manusia;
8. Pelaksanaan kegiatan operasional;
9. Pengawasan dan penilaian.

Meter dan Horn (1975) dalam Wahab (2005:65) merumuskan proses implementasi kebijakan ini sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.” Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008 : 139) mendefinisikan implementasi sebagai, “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OS) > (OA)$  disebut efektif”. Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksiono (1984) adalah: “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai

dengan output yang diharapkan dari sejumlah input“.

Steers (1985:87)mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya ituserta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

AdapunMartoyo (1998:4) memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

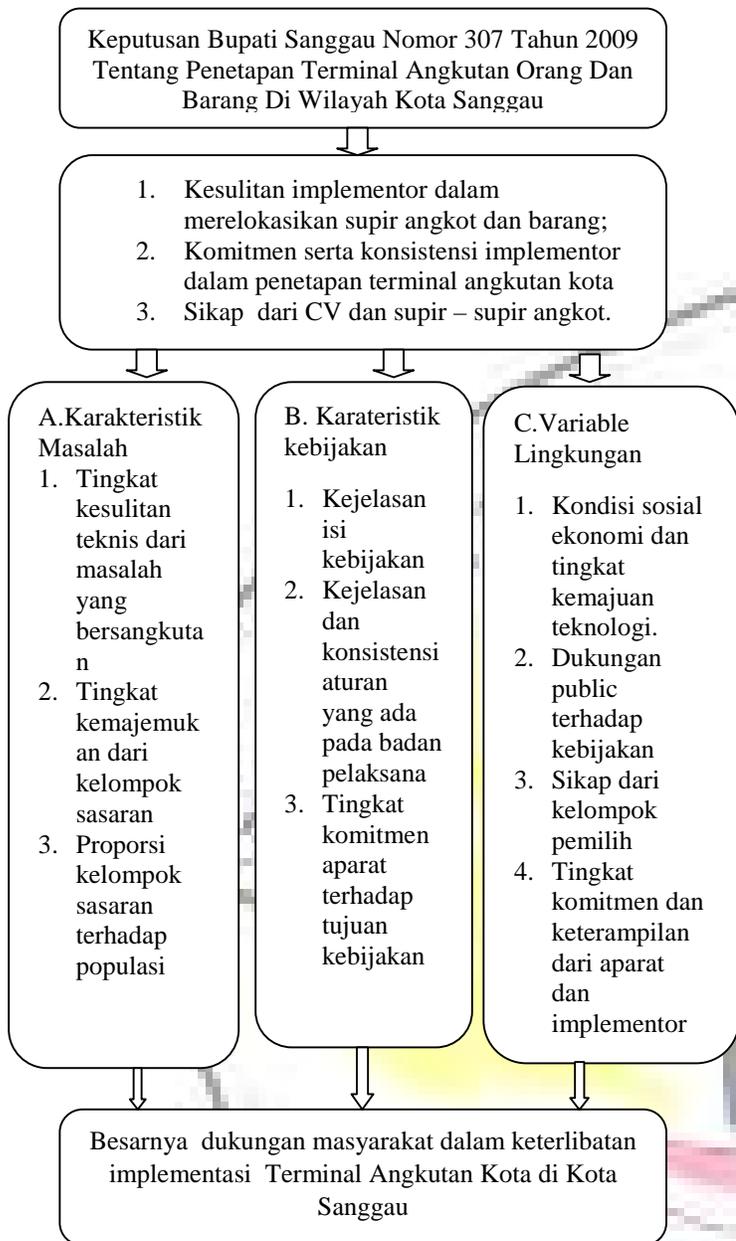
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teoriD.Mazmanian dan Sabatier, dengan argumentasi adalah bahwa penggunaan teori D.Mazmanian dan Sabatier dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk di uji akan tetapi lebih sebagai panduan atau pedoman bagi penulis dalam rangka untuk melaksanakan penelitian dilapangan.

Dilihat dari berbagai variable Implementasi Kebijakan yang telah dikemukakan oleh D.Mazmanian dan Sabatier diatas, apabila dikaitkan dengan

permasalahan penelitian ini dalam Implementasi kebijakan penetapan terminal angkutan kota dan barang di wilayah kota Sanggau adalah kesulitan Dinas perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan, komitmen dari implementor, serta sikap dan tanggapan supir-supir untuk melaksanakan penetapan terminal dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan pendirian terminal belum tercapai.

Dimana kita ketahui, karakteristik masalah merupakan suatu variabel dalam merumuskan suatu kebijakan, komitmen akan menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut ditambah lagi dukungan dari lingkungan sekitar akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu peneliti menganggapD.Mazmanian dan Sabatier yang mengatakan dalam implementasi kebijakan ada 3 variable yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan dirasa cocok dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah alur pikir penelitian dalam penelitian ini:



### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif kualitatif karena berusaha dan mencoba

memberi gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang diteliti dengan mengeksplor kecenderungan pelaksana. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan data-data terkumpul dan yang nampak sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian ini dilaksanakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Moleong (2011:6) metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kota Sanggau, Kecamatan Kapuas. Di kota Sanggau ada 3 terminal, yaitu : terminal angkot A. Yani yang berada di jalan A. Yani kota Sanggau, terminal angkot rawa bangun di jalan rawa bangun, dan terminal bus antar kota di jalan gajah mada. Secara pertimbangan di terminal rawa bangun yang cukup menarik hati saya adalah karena terminal ini belum efektif. Kemudian di terminal ini berdekatan dengan Terminal angkot A. Yani. Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan penulis pada 21 Juli 2014-25 Mei 2016 sedangkan waktu penyusunan laporan dan konsultasi penulis pada bulan Mei - hingga Agustus 2016. Adapun yang menjadi subjek

penelitian yang di ambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: Kepala Bidang Sarana penelitian di BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sanggau, Kepala Bidang Transportasi Perhubungan Darat di Kota Sanggau, Supir angkot yang berada di terminal A. Yani kota Sanggau, Penumpang angkot.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif peneliti bermaksud untuk memahami fenomena - fenomena apa saja yang terjadi di lapangan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata - kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Disini peneliti menggunakan metode keabsahan data Triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Moleong 2011: 330) membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan

teori. Peneliti melakukan triangulasi dengan meng-cross cek data - data yang didapat dari para sumber, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memeriksa kebenaran data yang peneliti dapat. Juga untuk membandingkan data - data tersebut, bila ada perbedaan, maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk memeriksa dengan teliti mana data yang derajat kebenarannya tinggi untuk kemudian diolah.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Faktor Yang Menyebabkan Belum Efektifnya Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Nomor 307 tahun 2009 Tentang Penetapan Angkutan Orang dan Barang di Wilayah Kota Sanggau

1. Tingkat Kesulitan Dalam Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Nomor 307 2009 Tentang Penetapan Angkutan Orang dan Barang di Wilayah Kota Sanggau.

Beberapa kebijakan mudah untuk diimplementasikan karena karakteristik masalah yang dihadapi tidak terlalu kompleks dan secara teknis mudah untuk dipecahkan.

Tingkat kesulitan di ukur dari permasalahan yang ada di lapangan, dan

apabila kemampuan implementor mempunyai keterampilan dalam mengatasi masalah maka masalah tersebut akan berdampak baik pada suatu kebijakan. Seberapa banyak tingkat kesulitan dalam implementasi akan mempengaruhi proses kebijakan tersebut.

Implementasi suatu kebijakan tentu melibatkan banyak unit yang terkait, oleh karena itu perlu adanya kerja sama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan atau program. Dan apabila dalam implementasi kebijakan sasaran kebijakan mengalami masalah yang sama maka akan mempengaruhi mudah tidaknya kebijakan di implementasikan. Dalam kaitan dengan proses implementasi kebijakan tentang penetapan angkutan orang dan barang di wilayah kota sanggau tingkat kesulitan merupakan masalah yang rumit bagi perumus kebijakan untuk mengimplementasikannya.

Kesulitan yang terjadi pada implementor adalah menetapkan fungsi terminal angkutan kota yang berada di jalan rawa bangun, tidak hanya kesulitan dalam penetapan terminal kota yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya kerja sama implementor terhadap sasaran kebijakan.

Dinas perhubungan kabupaten sanggau mempunyai 2 terminal angkutan kota di kota

sanggau yang saling berdekatan, hal ini adalah upayadalam mengatur dan meningkatkan kegiatan transportasi angkutan di kota. Dalam kaitan permasalahan ini perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan mempersiapkan hal - hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam Implementasi Peraturan Bupati nomor 307 Tahun 2009 tentang Penetapan Angkutan Orang dan Barang di Kota Sanggau agar tercapai dengan baik maka implementor harus memahami apa saja yang harus dilakukan agar tingkat kesulitan tidak membebani dalam proses implementasi kebijakan. Dari penjelasan hasil wawancara penulis mendapatkan dalam pelaksanaan perelokasian terminal angkutan kota, supir - supir yang terlibat langsung dalam penetapan angkutan orang dan barang mengeluh karena sepiunya penumpang di lokasi terminal rawa bangun. Yang terjadi pada supir - supir adalah kembalinya supir - supir beroperasi di terminal A. Yani. Menurut Kepala Dinas Bagian Angkutan Darat, segala upaya sudah di lakukan, hanya saja

supir-supir yang menolak pindah ke terminal rawa bangun, dan tetap beroperasi di terminal A.Yani. Pada hal tujuan dibangunnya terminal rawa bangun adalah memindahkan fungsi terminal angkutan kota yang ada di jalan A.Yani ke terminal rawa bangun.

Dalam upaya dan penyampaian kepada supir - supir angkutan orang dan barang di kota Sanggau apa yang yang harus diusahakan Dinas perhubungan harus jelas, isi penyampaian dan himbauan kepada supir - supir harus jelas, tindakan / sanksi terhadap supir - supir yang beroperasi di terminal A.Yani harus jelas. Karena apabila yang diusahakan Dinas perhubungan berupa Penyampaian atau himbauan kepada supir - supir serta tindakan atau sanksi yang diberikan tidak jelas maka akan menimbulkan ketidak beresan dalam mengoptimalkan terminal angkutan kota.

Masalah yang dialami oleh supir-supir adalah sepi pengunjung atau penumpang yang ingin berkunjung ke terminal rawa bangun disebabkan pasar rawa bangun tidak berfungsi dengan baik. Penjelasan dari implementor bahwa penyediaan terminal rawa bangun dikhususkan untuk terminal penumpang, sedangkan terminal A.Yani akan digunakan sebagai terminal angkutan barang. Hal ini di

lakukan agar ketertiban dalam transportasi menjadi lancar. Tindakan yang di lakukan implementor dalam perelokasian supir - supir tidak berjalan dengan waktu lama, dikarenakan supir - supir lebih memilih beroperasi di terminal A.Yani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesulitan dari masalah yang bersangkutan menjadi faktor penetapan terminal angkutan kota di kota Sanggau belum efektif dalam implementasi penetapan angkutan orang dan barang.

2. Kurangnya Komitmen Implementor Dalam Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Nomor 307 2009 Tentang Penetapan Angkutan Orang dan Barang di Wilayah Kota Sanggau.

Pada pelaksanaan suatu program atau implementasi suatu kebijakan bisa saja sudah memiliki tujuan yang jelas, namun masih terdapat aspek-aspek lain yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu aspek komitmen. Komitmen adalah tingkat atau ukuran kesungguhan dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pada kenyataannya dilapangan bahwa terminal angkutan kota rawa bangun yang berada di kota sanggau, belum menunjukkan kegiatan angkutan orang dan barang. Nampak terminal menjadi

sepi, kendaraan yang beroperasi tidak ada, sehingga menimbulkan kebingungan yang mengakibatkan belum efektifnya penetapan angkutan orang dan barang yang sudah terealisasi. Menurut Informasi yang di peroleh dari Kepala Bagian Sarana dan Prasarana BAPPEDA, diperoleh keterangan bahwa perelokasian terminal sudah dan pernah dilaksanakan. Masalahnya sepi pengunjung, tapi apabila Dinas perhubungan Komitmen dan bersungguh sungguh maka akan berbeda jadinya. Perelokasian dan himbauan hanya dilakukan cuma sekali. Ditambah lagi selama ini belum pernah ada kendaraan angkot atau oplet yang beroperasi diterminal rawa bangun sehingga penetapan terminal belum berjalan dengan baik. Dari penjelasan dan pernyataan diatas dapat di ketahui bahwa himbauan perelokasian supir - supir untuk menempatkan lokasi terminal rawa bangun di lakukan hanya sekali pada tahun 2010, kelanjutan dalam perelokasian supir - supir belum ada kejelasan. Kurangnya komitmen dalam mengelola, dan mengawasi kegiatan pada terminal menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan belum ada keseriusan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan diterminal. Hingga sampai sekarang status terminal rawa bangun belum menunjukkan adanya kegiatan angkutan penumpang maupun

barang. Penjelasan diatas menerangkan bahwa tingkat komitmen Dinas Perhubungan dalam menetapkan terminal sangat rendah.

### 3. Dukungan publik Dalam Implementasi Kebijakan Bupati Nomor 307 Tahun 2009 Tentang Penetapan Angkutan Orang dan Barang di Kota Sanggau

Pada pelaksanaan suatu program atau implementasi suatu kebijakan bisa saja sudah memiliki tujuan yang jelas, namun masih terdapat aspek-aspek lain yang berperan penting dalam pelaksanaan program atau kebijakan tersebut yaitu aspek dari dukungan publik. Dukungan publik dalam Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa :Implementasi program kebijakan yang memberikan motifasi dan intensif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, misalnya program-program subsidi. Sebaliknya kebijakan yang bernuansa menghilangkan motivasi dan insentif, akan kurang mendapat dukungan publik, misalnya kenaikan pajak.

Dukungan publik merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi proses pelaksanaan Implementasi kebijakan penetapan angkutan orang dan barang di wilayah Kota Sanggau. Dukungan publik dalam implementasi kebijakan adalah satu indikator berhasilnya suatu kebijakan. Kurangnya dukungan publik, atau sepi

penumpang yang menjadi faktor penyebab tidak efektif.

Dalam pelaksanaan dan penetapan angkutan orang dan barang, kurangnya dukungan dari masyarakat kota Sanggau adalah lajunya pertumbuhan kendaraan bermotor. Dapat dilihat juga bahwa, pilihan publik dalam menggunakan akses kendaraan bermotor pribadi menjadi penyebab minimnya dukungan publik dalam pelaksanaan angkutan orang. Pilihan menggunakan sepeda motor adalah cara publik untuk berkendara dan mencapai tujuan. Dari segi biaya, kendaraan bermotor lebih hemat dari pada menggunakan kendaraan angkot atau oplet. Untuk orang Dewasa dalam trayek di kenakan tarif Rp.5000 (lima ribu rupiah), sedangkan anak sekolah di dalam trayek di kenakan tarif Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah). Apabila di bandingkan dengan kendaraan bermotor yang berisikan BBM seharga Rp.8500 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter maka kendaraan bermotor lebih hemat karena bisa melebihi trayek yang dilakukan oleh kendaraan angkot.

Kurangnya dukungan publik dalam keterlibatan penetapan terminal dikarenakan masyarakat lebih memilih area yang berdekatan dengan lokasi perdagangan dan di tambah lagi kurangnya kemauan publik

dalam menggunakan kendaraan angkot adalah karena masyarakat lebih cenderung menggunakan kendaraan sepeda motor, ini membuat masyarakat kurang mendukung dan terlibat dalam penetapan angkutan orang dan barang di Kota Sanggau.

#### 4. Adanya Sikap Kelompok Pemilih Dalam Implementasi Kebijakan Penetapan Angkutan Orang dan Barang Di Kota Sanggau.

Dalam Mazmanian & Sabatier (1983) Sikap dari kelompok-kelompok pemilih. Sikap dari kelompok-kelompok pemilih (*contituency groups*). Dalam kehidupan masyarakat kelompok pemilih dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu :

1. Dapat melakukan intervensi terhadap berbagai macam keputusan yang dibuat oleh badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan.
2. Kelompok pemilih dalam segala upaya mempengaruhi badan badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan dan ungkapan kritis yang disampaikan kepada legislatif.

Dalam permasalahan ini aspek intervensi adalah cara kelompok tertentu untuk mempengaruhi Implementasi Kebijakan. Dari hasil pengamatan di lapangan peneliti menemukan fenomena bahwa C.V. atau perusahaan Kenari yang mengelola jumlah armada angkutan orang menolak untuk di relokasikan ke terminal rawa bangun. Pada saat di relokasikan, sebagai C.V perusahaan belum mendapatkan konfirmasi bahwa kendaraan yang masih beroperasi akan direlokasikan ke terminal rawa bangun.

Dalam penyampaian informasi tentang perelokasian terminal yang terjadi adalah Dinas perhubungan tidak melakukan konfirmasi terdahulu terhadap C.V perusahaan.

Pada saat pelaksanaan perelokasian terminal di rawa bangun, supir-supir dan perusahaan angkot bersedia untuk di relokasikan. Kemauan dari supir - supir menunjukkan bahwa beroperasi di terminal rawa bangun akan lebih baik karena pasar rawa bangun akan berfungsi nantinya dan mendapatkan penumpang lebih mudah. Pada kenyataannya di terminal rawa bangun masih banyak kurangnya pengunjung. Kegiatan yang ada di pasar rawa bangun belum menunjukkan aktifitas sebagai pasar, sehingga menimbulkan kebingungan antara

CV perusahaan dan supir-supir dalam mendapatkan penumpang. Penempatan terminal rawa bangun hanya ditempati kurang lebih 3 bulan oleh kendaraan dan supir angkot. Dikarenakan sepi pengunjung yang ingin menggunakan angkot, serta tidak berfungsinya pasar yang berada di rawa bangun maka oleh sebab itu supir-supir tidak beroperasi di terminal rawa bangun.

Mendengar keluhan dan tanggapan supir-supir, pihak CV perusahaan Kenari mencoba untuk berdiskusi dengan supir-supir mengenai sulitnya mendapatkan penumpang di rawa bangun. Maka dari itu CV kenari mencoba menarik semua armada angkutan.

Sikap-sikap dan protes juga dilakukan oleh CV.Perusahaan Kenari. Protes dan sikap yang ditunjukkan bahwa pada saat perelokasian,CV perusahaan belum mendapatkan konfirmasi oleh Dinas Perhubungan.Sikap dari CV perusahahan menolak untuk direlokasikan jumlah armada angkutan yang beroperasi di terminal A.Yani. Penolakan ini disebabkan CV perusahaaan tidak mendapatkan konfirmasi bahwa akan ada perelokasian terminal. Selain itu sikap yang di tunjukkan oleh CV adalah menarik semua armada angkutan penumpang untuk tidak beroperasi di terminal rawa bangun.

## E. KESIMPULAM

Belum efektifnya Implementasi Keputusan Bupati Tentang Penetapan Terminal Angkutan Orang dan Barang di Kota Sanggau dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu :

### 1. Tingkat kesulitan dari masalah

Kesulitan Dinas Perhubungan dalam merelokasikan supir-supir angkot adalah kurangnya koordinasi antara implementor dan sasaran kebijakan, kesulitan dalam mengoptimalkan terminal rawa bangun, letak terminal yang berjarak berdekatan, selain itu pula sepi pengunjung. Berbeda pada lokasi terminal A.Yani, kedekatan dengan pasar, serta letak terminal dipinggiran jalan negara membuat supir-supir tetap ingin beroperasi di terminal A.Yani, Hal ini membuat supir-supir tidak berkenan untuk beroperasi di terminal rawa bangun yang sepi pengunjung.

### 2. Komitmen serta konsistensi implementor terhadap tujuan kebijakan

Implementasi keputusan Bupati tentang penetapan angkutan orang dan barang belum secara maksimal. Terminal yang sepi tanpa aktifitas angkutan menggambarkan keseriusan dalam menetapkan terminal sangat rendah.

Pembangunan terminal rawa bangun dilakukan pada tahun 2009, hingga sekarang terminal tersebut tidak menunjukkan kegiatan transportasi angkutan. Tugas Dinas perhubungan sebagai pengelola terminal menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam menjalankan keputusan Bupati sangat kurang maksimal.

### 3. Sikap dari kelompok pemilih

Implementasi keputusan Bupati tentang Penetapan Angkutan Orang dan Barang tidak terlepas dari keterlibatan CV perusahaan dan supir yang sebagai sasaran dari kebijakan. Yang terjadi adalah CV.Perusahaan angkot menolak apabila kendaraan dari CV beroperasi di terminal rawa bangun. CV angkot beralasan bahwa, terminal rawa bangun sepi, dan sulit mendapatkan penumpang bahkan akan mengurangi pendapatan dan target.

### 4. Dukungan public terhadap kebijakan

Kurangnya keterlibatan masyarakat kota sanggau dalam menggunakan kendaraan angkot adalah dikarenakan masyarakat kota Sanggau mengandalkan kendaraan sepeda motor untuk mengakses tujuan, kecuali anak sekolah yang beperulangan. Pilihan yang dilakukan

oleh public adalah dikarenakan murah dan cepat menggunakan sepeda motor.

## F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya implementor mencari solusi dan memecahkan masalah dalam merelokasikan supir - supir angkot di terminal A.Yani untuk bisa direlokasikan ke terminal rawa bangun. Hal ini bertujuan agar pihak pelaksana dalam menetapkan terminal angkutan kota mempunyai solusi dalam memahami dan mengerti kondisi terminal rawa bangun. Salah satu alasan supir adalah kondisi terminal rawa bangun yang berdekatan dengan terminal A.Yani, kondisi yang sepi, dan kurang efektifnya penunjang keramaian di sekitar rawa bangun. Penunjang keramaian dalam pengadaan transportasi kota sangatlah penting, penunjang tersebut seperti tempat hiburan atau pasar dan lain lain. Sehingga keramaian disekitar terminal lebih memberi kesempatan dan membuka peluang kepada supir-supir terutama

mudahnya menunggu dan mendapatkan penumpang.

2. Perlunya pendampingan dan pengawasan secara langsung oleh pelaksana penetapan terminal tingkat provinsi agar pelaksana program ditingkat kabupaten atau kota memiliki komitmen yang tinggi serta dapat memahami sejauh mana perkembangan penyelenggaraan sebuah terminal, dan angkutan orang, dalam menganalisis prosedur, mekanisme penyelenggaraan terminal serta penetapan lokasi terminal seperti yang tertuang dalam petunjuk penetapan lokasi terminal.
3. Perlunya implementor mengembangkan dan menyesuaikan dengan rencana pengembangan dan pusat kegiatan. Kegiatan yang menunjang seperti kegiatan pasar sangatlah penting. Agar perkembangan dan akses angkutan kota dapat disesuaikan dengan kegiatan turun naiknya penumpang
4. Implementasi penetapan angkutan orang dan barang dibutuhkan proses dan kerja sama yang baik, terutama oleh Implementor kebijakan dan penyedia kendaraan angkutan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dalam penetapan terminal angkutan kotaberjalan dengan lancar. Serta koordinasi dan penyampaian

informasi yang baik akan menciptakan keharmonisan dalam membangun suatu wadah transportasi.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Pengantar Kebijakan Negara, Jakart: Rhimena Cipta

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyu Publishing.

## G. REFERENSI

Agustino, leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Anwar.2005. Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah.P.T Media Tama.Jakarta

Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro

Djoni Agustaf, 2002. Evaluasi Optimasi Angkutan Umum, Tesis Program Pascasarjana Unhas, Makassar

Hidayat.1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press.Yogyakarta

Ginting.S.P,1998.Sistem Pemerintahan. University press,P.T.Permata Artistika Kreasi Depok

Moleong, Lexy, 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja posda karya Mustopadidjaja. A.R, 1992. *Studi Kebijaksanaan, Perkembangandan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP FEUI.

Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi teory dan praktik/ Surabaya: CV. Putra Media Nusantara

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo Prasetyo Budi Saksono,1984. Dalam Menuju SDM Berdaya.Bumi Aksara.Jakarta

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan I. Bandung: Pusli KP2W Unpad

Warpani, S. Merencanakan Sistem Perangkutan, ITB, Bandung

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri.Perhubungan No 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan umum.

Peraturan Pemerintah

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 307 Tahun 2009. Tentang Penetapan Terminal angkutan orang dan barang di wilayah kota Sanggau



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RAMASYAFARDI  
 NIM / Periode lulus : E.011.09068 / Periode I  
 Tanggal Lulus : 25 Mei 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI Negara  
 E-mail address/ HP : Ramasyafardi@gmail.com / 08524504098A

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ... PUBLIKA ... \*) pada Program Studi ... IAN ... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Bupati Nomor 307 Tahun 2009 Tentang Penetapan Terminal Angkutan Orang dan Barang di Kota Sanggau

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ditsetujui  
 Pengelola Jurnal  
[Signature]  
 Dr. Parli, S.Sos, M.AB  
 NIP. 1972090052002121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 12 Januari 2017

[Signature]  
 RAMASYAFARDI  
 NIM. H. 0809068

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi SocioDev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)